

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama lebih dari setengah abad, sejak perang dunia II berakhir kapasitas Jepang untuk membangun kekuatan militernya dikekang oleh konstitusi 1947. Konstitusi tersebut dibuat oleh Amerika Serikat sebagai Negara pemenang Perang Dunia II untuk mencoba melucuti semua kapasitas Militer Jepang yang telah memicu Perang Dunia II. Dengan adanya konstitusi tersebut Negara Jepang yang tadinya bersifat ekspansi-imperial dan suka perang, kini telah berubah menjadi Negara pasif yang selalu menekankan solusi damai diluar kekerasan dan militerismenya.

Isu amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang kembali mengemuka ketika pada pembukaan sesi sidang Parlemen Jepang pertengahan Oktober lalu, Perdana Menteri Shinzo Abe menyampaikan pidato yang mengindikasikan bahwa ia tetap meneruskan rencana mengamandemen Konstitusi Pasifis Jepang. Langkah Shinzo Abe tersebut menimbulkan perdebatan dan penolakan di dalam negeri, dan mengundang perhatian negara-negara tetangganya di kawasan. Ada kekhawatiran bahwa amandemen tersebut akan mengembalikan kekuatan Jepang yang agresif.¹ Perkembangan yang sangat menarik dari politik di Jepang adalah adanya keinginan Jepang untuk membangun kembali kekuatan militernya sebagai basis keamanan dan pertahanan Jepang yang selama ini bergantung pada Amerika

¹ Rizki Roza, 2013, *Implikasi Amandemen Pasal 9 Jepang Terhadap Kawasan*, dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-20-I-P3DI-Oktober-2013-75.pdf diakses pada tanggal 03 April 2018

Serikat. Isu ini telah memberikan dampak signifikan bagi dinamika eksistensi pasal 9 yang telah banyak diperdebatkan oleh para anggota diet, antara kaum kanan yang menginginkan amandemen pasal 9 sedangkan kaum kiri yang tetap menganggap pasal 9 sebagai pasal yang tidak perlu diamandemen.

Hal ini telah memberikan dampak yang semakin tidak jelasnya fungsi militer di Jepang, di satu sisi dianggap sebagai pasukan *self-defense*, tapi di sisi yang lain mereka memiliki kemampuan yang setara dengan militer pada umumnya. Karena isu amandemen 9 ini muncul sebagai respon terhadap dinamika eksternal dari hubungan internasional Jepang. Pemerintahan di Tokyo berdalih amandemen undang-undang keamanan diperlukan sebagai reaksi atas perubahan iklim keamanan di Asia Timur, termasuk ancaman dari nuklir Korea Utara dan ambisi militer China di Laut China Timur dan Selatan.² Disini Shinzo Abe yakin bahwa perubahan peran militer Jepang akan menguntungkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat melalui aliansi kedua negara.

Kaum kiri cenderung khawatir terhadap dinamika aliansi militer Amerika-Jepang dalam sebuah kerangka mutual *security treaty* misalnya akan membawa Jepang ke era 1930-an yang diwarnai oleh peperangan. Kaum kiri adalah golongan yang tidak menginginkan terjadinya amandemen (Oposisi). Sementara kaum kanan, menganggap bahwa progresifitas gerakan kaum kiri akan membawa Jepang ke arah yang lebih labil tanpa ada kekuatan yang dapat menunjang kepentingan Jepang di Luar Negeri. Kaum kanan adalah golongan yang sangat menginginkan terjadinya amandemen. Isu amandemen 9 telah menarik perhatian

² 2016, *Pasca Amandemen Militer Jepang Siap Ekspansi ke Luar Negeri*, dalam <http://www.dw.com/id/pasca-amandemen-militer-jepang-siap-ekspansi-ke-luar-negeri/a-19147626> diakses pada 03 April 2018

para politisi dan masyarakat Jepang sendiri dalam menanggapi dinamika eksternal dari hubungan luar negeri Jepang. Beberapa waktu lalu tepatnya Mei 2007, Jepang sedang menghadapi masalah besar yang berkaitan dengan konstitusi atau undang-undang negaranya. Pemerintahnya sedang berusaha melakukan amandemen konstitusi Negara secara menyeluruh. Namun dari beberapa amandemen yang ada, masalah yang paling menimbulkan polemik didalam maupun diluar negeri adalah masalah konstitusi yang menyangkut perang. Konstitusi ini di Jepang tertuang didalam undang-undang Jepang pasal 9:³

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of aggression of the state will not be recognized.” (The Japanese Constitution)”

Konstitusi telah ditetapkan beberapa tahun setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, yakni pada tanggal 03 Mei 1947. Kekalahan Jepang pada PD II mengakibatkan negara ini harus menerima konstitusi Meiji 1889 digantikan dengan konstitusi yang dibuat oleh 24 pengacara Amerika Serikat dibawah ketua Charles Louis Kades atas kuasa dari Jendral McArthur.⁴ Hal ini merupakan awal bagi Jepang untuk melucuti militernya secara sistematis dan konstitusional. Jepang dipimpin oleh tokoh yang beraliran *pasifisme* (anti perang) keras, yaitu Perdana Menteri Shigeru Yoshida, sehingga konstitusi tersebut tak masalah diadopsi oleh Jepang. Sampai saat inipun terkecuali aliran kanan, masyarakat Jepang secara umum menganggap bahwa pasal 9 ini telah berjasa dan

³ Rizki Roza, *Op.Cit.*, hal. 1

⁴ 1890: *Konstitusi Meiji Berlaku*, 2017, dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/134152-1890-konstitusi-meiji-berlaku> diakses pada tanggal 03 April 2018

memberikan kontribusi yang besar dalam mengantarkan Jepang ke pintu gerbang kemajuan yang telah dicapainya sekarang ini. Semua kebijakan Jepang lebih mengarah ke bidang ekonomi. Hubungan yang dibangun kemudian difokuskan pada bidang non-militer dan non-politik.⁵ Setiap konflik dunia yang muncul, Jepang tidak pernah mengikutsertakan pasukan militernya untuk membantu. Kontribusi yang dilakukan oleh Jepang lebih kepada bantuan finansial.

Pada tahun 1991, Perdana Menteri Kiichi Miyazawa mengeluarkan konstitusi yang membenarkan keikutsertaan tentara bela diri Jepang, SDF (*Self Defence Force*) untuk tugas penyelesaian konflik dunia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Saat itu kemudian tentara Jepang lebih dikenal sebagai PKO (*Peace Keeping Operation*).⁶ Pendapat pun banyak bermunculan ketika PKO tersebut diterjunkan dalam membantu misi perdamaian PBB. Bagi negara-negara yang pernah berurusan atau bermasalah dengan Jepang pada masa PD II, mereka mengkhawatirkan hal tersebut sebagai bentuk kebangkitan kembali militerisme Jepang. Namun, pendapat positif muncul dari aksi musuh Jepang pada PD II, Amerika Serikat. Amerika Serikat mengkritik Jepang terhadap kontribusinya yang hanya bersifat bantuan finansial saja, terutama saat operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (*war on terrorism*), dan terutama pada saat penyerangan Amerika Serikat ke Afganistan dan Irak.

Pengiriman SDF mulai dilakukan ketika konflik berkecamuk di Kamboja dan Timor-Timur. Sedangkan pengiriman SDF ke Irak, menurut beberapa

⁵ Erik Sjamsumar, 2005, *Amandemen UUD Jepang Pasal 9*, dalam <https://ameblo.jp/prasasti0723/entry-10001794293.html> diakses pada tanggal 03 April 2018

⁶ Fumiko Sato, 2012, *A Camouflaged Military: Japan's Self Defense Force and Globalized Gender Mainstreaming*, dalam <https://apjif.org/2012/10/36/Fumika-Sato/3820/article.html> diakses pada tanggal 03 April 2018

kalangan berkaitan erat dengan hubungan politik Jepang dengan Amerika Serikat. Pengiriman SDF lewat team tentara penjaga perdamaian (*Peace Keeping Force*) di Kamboja dan Timor-Timur dilaksanakan atas kontribusi dengan PBB. Namun, pengiriman SDF ke Irak lebih dilakukan dalam kontribusi yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Jepang-Amerika Serikat.⁷ Sebagian pengamat politik ada yang menganggap bahwa hal tersebut dilakukan Jepang karena adanya kelemahan politik Jepang dalam mengambil sikap. Dan sebagian lagi menganggap bahwa pilihan tersebut adalah jalan terbaik yang harus dilalui Jepang.

Permasalahan pasal 9 Konstitusi 1947 ini juga dipengaruhi oleh pemikiran tiga kelompok di Jepang. Pemikiran pertama berasal dari kelompok realis-militer, yang berpendapat bahwa Jepang harusnya memperoleh tanggung jawab militer lebih besar dalam masalah pertahanan. Selain itu, SDF Jepang harus meningkatkan kemampuan komando, kontrol, komunikasi serta militer.⁸ Kelompok kedua yang berhaluan nasionalis berpendapat bahwa Jepang seharusnya melepaskan diri dari Amerika Serikat dan membentuk pertahanan sendiri. Selain itu, Jepang harus lebih membatasi pengembangan kemampuan militernya.

Kelompok ketiga ialah kelompok pasifis, kelompok ini menganggap bahwa Jepang harus lebih berkontribusi dalam penciptaan perdamaian bersama PBB serta mengakhiri hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Serta tetap mendukung konstitusi mengenai konstitusi, terutama pasal 9 dan mengurangi

⁷ *Ibid.*,

⁸ Rizma Afian Azhiim, *Diskursus Yang Mendisiplinkan Tubuh: Menciptakan Demokrasi dan Perdamaian Melalui Konstitusi Jepang 1947*, dalam https://www.academia.edu/1323011/Diskursus_yang_Mendisiplinkan_Tubuh_Menciptakan_Demokrasi_dan_Perdamaian_Melalui_Konstitusi_Jepang_1947 diakses pada tanggal 04 April 2018

kemampuan militernya.⁹ Perbedaan pemikiran tersebut telah memberikan dampak bagi dinamika amandemen pasal 9 dari konstitusi Jepang, sehingga jarang dalam parlemen terjadi perdebatan panjang untuk amandemen pasal 9 tersebut. Nampaknya kecenderungan untuk mengamandemen pasal 9 masih menjadi pertimbangan besar bagi Jepang yang lebih mengarah pada kelompok kanan dan kiri.

Permasalahan ini kemudian menjadi lebih menarik untuk dibahas dikarenakan Jepang telah menghadapi berbagai kesulitan dalam mengambil sikap pada berbagai kebijaksanaan politik internasionalnya, sehingga Jepang mempertanyakan kembali akan hakekat eksistensi pasal 9 dalam konstitusinya. Keberadaan konstitusi tersebut sekarang telah membatasi ruang gerak Jepang untuk membangun kapasitas militernya, terutama keinginan Jepang untuk berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Maka, dari latar belakang tersebut peneliti kemudian memutuskan untuk mengambil judul penelitian, yakni: **“Respon China Terhadap Amandemen Pasal 9 Jepang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yakni: Bagaimana Respon China Terhadap Amandemen Pasal 9 Jepang?

⁹ *Ibid.*,

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tentang amandemen 9 terhadap pemerintahan Shinzo Abe, dan juga mengetahui kepentingan Jepang dalam mengamandemen pasal 9 ini di antara hubungan Jepang dan China.

1.3.2 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat ataupun sumbangan ilmu dan pemikiran terhadap pembaca khususnya Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai respon China terhadap amandemen pasal 9 Jepang sehingga dapat dijadikan salah satu rekomendasi terhadap penelitian-penelitian kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih terhadap pembaca mengenai manfaat untuk mengetahui perkembangan Jepang dalam memperbaiki hubungan antar Negara tetangga dengan cara mengamandemen pasal 9.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan skripsi oleh Achmad Firdaus yang berjudul *Evaluasi Hubungan Jepang – Amerika Serikat Dari Segi*

Militer.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, Achmad Firdaus menggunakan metode Deskriptif dengan menggunakan teori Aliansi, konsep Kepentingan Nasional, konsep Keamanan. Dalam penelitiannya, Achmad Firdaus mengemukakan bahwa keberhasilan Jepang dibidang ekonomi telah membuat Jepang muncul sebagai satu kekuatan ekonomi yang dapat diperhitungkan di dunia internasional. Pada masa pasca perang dingin, keterkaitan ekonomi dan keamanan menjadi hal yang penting untuk dibahas di dunia internasional. Dengan kondisi seperti itu dimana Amerika Serikat menjamin keamanan Jepang dengan secara otomatis meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanannya. Peran keamanan Jepang dalam aliansi Jepang – Amerika Serikat sebenarnya telah dimulai sejak perang Dingin, dimana selain memberikan jaminan perlindungan militer bagi Jepang, Amerika Serikat juga telah mendorong Jepang untuk memperluas serta mengembangkan kebijakan pertahanannya. Kebijakan-kebijakan ini dibentuk sedemikian rupa agar dapat menunjang strategi Amerika Serikat di kawasan Timur Jauh seperti yang digariskan dalam traktat pertahanan kedua negara. Namun, beberapa tahun belakangan ini Jepang merasa tidak puas terhadap perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat selaku penjamin keamanan.

Penelitian terdahulu berikutnya merupakan skripsi milik Ibnu Fadilla Purwaka yang berjudul *Upaya Jepang Dalam Proses Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Tentang Kebijakan Pasifisme Dan Dukungan Amerika Serikat*

¹⁰ Achmad Firdaus, E13110273, 2014, *Evaluasi Hubungan Jepang – Amerika Serikat Dari Segi Militer*, FISIP Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Hasanuddin

*Periode 2014-2016.*¹¹ Dalam penelitian tersebut, Ibnu Fadilla Purwaka menggunakan metode Deskriptif dengan menggunakan konsep Kepentingan Luar Negeri dan konsep Kepentingan Nasional. Dalam penelitiannya, Ibnu Fadilla Purwaka mengemukakan bahwa kepentingan Jepang mengamandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang tentang kebijakan pasifisme dukungan Amerika Serikat periode 2014 sampai 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengapa Jepang ingin mengamandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat dari tahun 2014 sampai 2016. Rencana amandemen Pasal 9 tersebut yang ingin dilakukan oleh pemerintah Jepang membuat rencana tersebut menjadi masalah yang serius di wilayah domestik Jepang. Masalah tersebut juga sampai saat ini belum terselesaikan karena adanya pro dan kontra antara masyarakat Jepang dengan Pemerintah Jepang. Rencana Jepang untuk mengamandemen Pasal 9 tersebut merupakan suatu langkah yang dianggap penting untuk memudahkan Jepang memenuhi kepentingannya di kawasan dan global. Rencana tersebut juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat sebagai aliansinya di kawasan.

Ketiga, penelitian selanjutnya adalah skripsi milik Nuraini yang berjudul *Analisa Rencana Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang Oleh Perdana Menteri Shino Abe.*¹² Dalam penelitiannya, Nuraini menggunakan metode Eksplanatif dengan menggunakan teori Psikoanalisa. Dalam penelitiannya, Nuraini mengemukakan bahwa rencana amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang

¹¹ Ibnu Fadilla Purwaka, 11141130000014, 2018, *Upaya Jepang Dalam Proses Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Tentang Kebijakan Pasifisme Dan Dukungan Amerika Serikat Periode 2014-2016*, FISIP Ilmu Hubungan Internasional. UINJKT

¹² Nuraini, 201410360311026, 2018, *Analisa Rencana Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang Oleh Perdana Menteri Shino Abe*, FISIP Ilmu Hubungan Internasional, UMM

tahun 1947 oleh Shinzo Abe dimaksudkan agar militer Jepang dapat bergerak bebas dan agar kegiatan militer Jepang mendapat pengakuan konstitusional. Hasil penelitian Nuraini adalah Shinzo Abe berencana untuk mengubah Pasal 9 karena faktor kesadaran dan ketidaksadaran dalam dirinya, di mana nilai-nilai yang Shinzo Abe dapatkan dari lingkungan sosial, kelompok sosial dan keluarga terutama kakeknya, nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasi dan membentuk kepribadian Shinzo Abe yang kemudian mempengaruhi tindakan Shinzo Abe terutama dalam kebijakannya mengubah Pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1947.

Keempat, penelitian selanjutnya dari Rizki Roza yang berjudul *Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan*.¹³ Dalam penelitiannya, Rizki Roza mengemukakan bahwa pemerintahan Shinzo Abe kembali mengusulkan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memperluas peran militer Jepang, dan juga mengajukan kenaikan anggaran militer untuk memperkuat militer. Langkah Abe tersebut menimbulkan perdebatan dan penolakan di dalam negeri, dan mengundang perhatian negara-negara tetangganya di kawasan. Ada kekhawatiran bahwa amandemen tersebut akan mengembalikan kekuatan Jepang yang agresif. keberadaan Pasal 9 sendiri telah memberikan kebanggaan kepada sebagian warga Jepang sebagai satu-satunya negara yang dengan tegas menolak perang dalam konstitusinya. Namun di sisi lain, publik Jepang juga menyadari perlunya peningkatan kekuatan militer akibat adanya ketakutan terhadap kemajuan militer China di tengah pemotongan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Dengan merevisi Pasal 9, setiap peningkatan

¹³ Rizki Roza, 2013, *Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan*, dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-20-I-P3DI-Oktober-2013-75.pdf diakses pada tanggal 05 November 2018

kekuatan militer Jepang akan secara signifikan memengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan.

Kelima, penelitian selanjutnya milik Ananda F. Ayu yang berjudul *Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer*.¹⁴ Dalam penelitiannya, Ananda F. Ayu mengemukakan bahwa penelitiannya memfokuskan pada bagaimana upaya Jepang untuk meningkatkan militernya. Upaya Jepang yang akan mengeluarkan kebijakan di mana Jepang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan militer. Jepang telah mengalami banyak perkembangan setelah Perang Dingin untuk menjadi salah satu militer paling maju di Asia Timur. Ini karena dorongan keinginan Amerika Serikat untuk menjaga wilayah itu dari Asia Timur hingga pasukan militer Korea Utara. Pedoman Program Pertahanan Nasional atau *National Defense Program Guidelines* tahun 2010 membawa perubahan baru dalam konsep pertahanan Jepang. Perubahannya terletak pada adanya konsep *Dynamic Defense Force* untuk menggantikan *Basic Defense Force* yang telah digunakan sejak *National Defense Program Outline* pada tahun 1976 karena Shinzo Abe memiliki posisi dan legitimasi yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan dukungan LDP sebagai partai mayoritas menguasai parlemen, dan tingkat penerimaan orang yang tetap baik. Kebijakan pertahanan yang telah dikeluarkan oleh Shinzo Abe di latar belakang untuk mendukung kondisi regional di Asia Timur semakin tidak aman. Terutama terkait dengan kekhawatiran yang berkembang dari orang Jepang di kedua negara. Upaya

¹⁴ Ananda F. Ayu, 2015, *Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer*, dalam <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/viewFile/1721/1523> diakses pada tanggal 05 November 2018

tersebut dirasa dapat meningkatkan kondisi regional militer Jepang di Asia Timur. Hal ini juga karena dukungan rakyat Jepang terhadap masalah keamanan, termasuk perubahan konstitusi, akan terus tumbuh di masa depan.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Nama/ Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	<i>Evaluasi Hubungan Jepang – Amerika Serikat Dari Segi Militer</i> Oleh: Achmad Firdaus	Deskriptif menggunakan teori Aliansi, konsep Kepentingan Nasional, konsep Keamanan	Keberhasilan Jepang dalam bidang ekonomi yang dapat diperhitungkan dunia internasional. Amerika Serikat adalah negara yang menjamin keamanan Jepang, memberikan jaminan perlindungan militer Jepang dan Amerika Serikat pula yang mendorong Jepang untuk mengembangkan dan memperluas kebijakan pertahanannya. Namun, ada rasa ketidak puasan Jepang terhadap Amerika Serikat selaku penjamin keamanan.
2.	<i>Upaya Jepang Dalam Proses Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Tentang Kebijakan Pasifisme Dan Dukungan Amerika Serikat Periode 2014-2016</i> Oleh: Ibnu Fadilla Purwaka	Deskriptif menggunakan konsep Kepentingan Luar Negeri dan konsep Kepentingan Nasional	Keinginan Jepang untuk mengamandemen pasal 9 Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat. Rencana ini mengalami Pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintahan Jepang, ini adalah salah satu langkah yang dianggap penting untuk Jepang agar bisa memenuhi kepentingan kawasan dan global.
3.	<i>Analisa Rencana Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang Oleh Perdana Menteri Shino Abe</i>	Eksplanatif menggunakan teori Psikoanalisa	Rencana Shinzo Abe mengamandemen pasa 9 Jepang ini adalah berharap kegiatan militer Jepang bisa berkembang dan dapat pengakuan dari konstitusional. Disini Shinzo Abe dipengaruhi dari beberapa faktor yang mepengaruhinya agar mengamandemen pasal 9 Jepang.

	Oleh: Nuraini		
4.	<i>Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer</i> Oleh: Ananda F. Ayu		Pemerintahan Shinzo Abe yang ingin menaikkan anggaran militer yang menimbulkan perdebatan di Jepang dan mengundang perhatian negara-negara di kawasan Asia Timur. Adanya kekhawatiran yang membuat kekuatan militer Jepang menjadi agresif. Dari sisi publik Jepang juga perlu peningkatan karena kekuatan militer China mengalami kemajuan ditengah pemotongan anggaran pertahanan Amerika Serikat.
5.	<i>Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan</i> Oleh: Rizki Roza		Perkembangan militer Jepang pasca perang dingin di Asia Timur, karena adanya dorongan Amerika Serikat untuk menjaga wilayah Asia Timur. Shinzo Abe pada saat itu mendapat dukungan LDP sebagai partai mayoritas yang menguasai parlemen dan melatari kondisi regional Asia Timur yang semakin tidak aman.

1.5 Konsep

1.5.1 Security Dilemma

Robert Jervis secara sederhana menyebutkan bahwa *security dilemma* adalah kondisi ketika satu negara meningkatkan keamanannya maka akan membuat kondisi keamanan negara lain menurun. *Security Dilemma* dalam Hubungan Internasional, yang juga dikenal sebagai *spiral mode* (mode spiral) kerap digambarkan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara yang memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya, seperti meningkatkan kekuatan militer atau pun membentuk aliansi dengan negara lain. Tindakan tersebut dapat menyebabkan negara-negara lain, terutama negara tetangga yang berada di sekitarnya, menanggapi tindakan tersebut dengan

tindakan/langkah serupa. Hal tersebut kemudian akan mampu meningkatkan ketegangan hingga terciptanya konflik, terutama di suatu kawasan internasional.¹⁵

Apabila satu negara berusaha meningkatkan kapabilitas militernya maka akan dianggap melemahkan keamanan negara lain. Baik untuk tujuan ofensif maupun hanya defensif, peningkatan kekuatan militer otomatis akan memunculkan kecurigaan dan perasaan insecure bagi negara tetangganya. Maksud atau intensi dari negara lain akan menjadi sangat sulit dibaca dan diperkirakan karena pengaruh dari *security dilemma*.¹⁶ *Security dilemma* akan muncul diantara dua negara ketika salah satu mengambil tindakan defensif untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi hal tersebut juga dapat dibaca sebagai tindakan *offensive* oleh negara lain, atau dengan kata lain salah membaca intensi tersebut (*mispercieves/misreads*).¹⁷ *Security dilemma* akan menciptakan persaingan antar negara dalam upaya untuk meningkatkan keamanan masing-masing. Dalam hal ini, setiap negara tentu tidak mau disaingi oleh negara lain dalam peningkatan keamanannya sendiri. Untuk itu, negara akan membentuk anggaran militernya sebagai hasil dari upaya untuk menyisihkan devisa negara untuk kepentingan persenjataan.

Sejak amandemen pasal 9 Jepang, pemerintahan mengajukan anggaran untuk mengembangkan militer Jepang untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan negara. Peningkatan kekuatan militer ini akan berdampak kepada

¹⁵ Robert Jervis, 2007, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*, Pearson Longman, London, dalam Bunga Fitria Bangun, *Dinamika Hubungan Diplomatik China-Jepang Pasca Modernisasi Militer China*, Skripsi, Ilmu Hubungan Internasional UMM, Januari 2017, <http://eprints.umm.ac.id/36183/2/jiptummp-gdl-bungafitri-48916-2-babi.pdf> Hal. 12 diakses pada tanggal 25 November 2018

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

negara tetangganya, yang bias memunculkan rasa tidak aman dan terancam. Di sisi lain, juga bias memicu meningkatnya tensi hubungan di antar negara. Mengingat hubungan Jepang dan negara-negara di Asia Timur lainnya kurang baik karena adanya konflik sengketa wilayah. Sehingga di resmikannya amandemen pasal 9 Jepang ini dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara di Asia Timur yang akan dimanfaatkan untuk melakukan serangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa

Variabel dependen atau unit analisa penelitian ini berada pada level negara dan negara, yaitu mengenai kepentingan Jepang untuk mengamandemen pasal 9, karena objek yang perilakunya akan dianalisa adalah Jepang. Sedangkan variable independen atau unit ekplanasi pada penelitian ini berada pada level negara dan negara, yaitu respon China terhadap amandemen pasal 9 Jepang. Sehingga penelitian ini menggunakan model penelitian korelasionis, dimana unit analisa dan unit ekplanasi pada penelitian ini berada pada level yang sama.

1.6.2 Metode/Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekplanatif, di mana penelitian ini untuk menjelaskan hubungan anatar variabel. Variabel independen dan variable dependen dalam penelitian ini merupakan variabel yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kemudian kedua variabel tersebut melahirkan sebuah hipotesis dan penulis menguji kebenaran hipotesis tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah telaah pustaka atau *library research*, atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Teknik ini digunakan data sekunder yaitu data-data tersebut berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.¹⁸

1.6.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang diolah dan digunakan menjadi data deduktif, dimana penulis memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah secara umum, lalu kemudian memaparkan secara khusus pengaruh dari masalah yang terlebih dahulu digambarkan.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis memberikan ruang lingkup penelitian. Diantaranya dilihat dari akhir tahun 2014 sampai pertengahan 2018, dimana pemerintahan Shinzo Abe juga mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun 2015 dengan argumen bahwa diperlukan

¹⁸ Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, Hal. 57

penguatan pertahanan untuk merespons pertumbuhan pesat militer China dan ancaman nuklir Korea Utara, pemerintahan Shinzo Abe mengajukan kenaikan anggaran pertahanan tertinggi sejak 22 tahun terakhir.

1.7 Hipotesa

Setelah adanya amandemen pasal 9 Jepang yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman dari luar dan ingin menjamin keamanan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Namun di sisi lain, China mengkhawatirkan peningkatan kekuatan militer Jepang dapat berpotensi sebagai ancaman bagi keamanan kawasan. Semakin meningkatnya intensitas konflik diantara negara-negara Asia Timur yang memiliki kekuatan militer yang sudah berkembang lebih dulu dan membuat hubungan bilateral semakin menurun karena adanya tensi yang terus meningkat.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.4 Penelitian Terdahulu
- 1.5 Kerangka Pemikiran
- 1.6 Metode Penelitian
- 1.7 Hipotesis
- 1.8 Sistematika Penulisan

Bab II : Peningkatan Kekuatan Militer Jepang

- 2.1 Sejarah militer Jepang
 - 2.1.1. Kekuatan Militer Jepang di Perang Dunia II

2.1.2. Kekuatan Militer Jepang Pasca Perang Dunia II

2.2 Stabilitas Militer Jepang Pasca Perang Dunia II

2.3 Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

Bab III : Upaya China Meningkatkan Kapabilitas Militer China Sebagai Respon China Terhadap Peningkatan Anggaran Militer Jepang

3.1 Peningkatan Anggaran Militer China

3.2 Respon China terhadap Anggaran militer Jepang

3.3 Pengaruh Peningkatan Anggaran Militer China dan Jepang di kawasan

Bab IV : Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

